

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)

Ayu Rahmawati
M.G. Wi Endang
Rosalita Rachma Agusti
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email : ayuayurahmawati@gmail.com

Abstract

Tax is one element that is important for the acceptance of a country to finance expenditure, both routine expenditure and development expenditure. At the company, regarded as a tax burden that will reduce net income. Taxes are imposed on the company can not be separated from the role of corporate social responsibility and corporate governance. This study was to determine the effect of disclosure of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance for the Avoidance of Double Taxation. The proportion of independent board, managerial ownership, institutional ownership, the quality of the external auditor and the audit committee is variable GCG type of research is explanatory research. The study used a sample of 20 companies listed on the Stock Exchange 2012-2014 by using purposive sampling technique. This type of data is secondary data in the form of annual reports is sourced from Indonesia Stock Exchange website. Regression results explaining that the proportion of independent commissioners CSR and positive and significant influence, managerial ownership, institutional ownership, has a negative and significant effect on tax avoidance, while the quality of the audit committee and external auditors for the company's value.

Keywords : Corporate, Institutional, Auditor

Abstrak

Pajak adalah salah satu unsur penerimaan yang penting bagi suatu negara guna membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak yang dikenakan pada perusahaan tidak terlepas dari peran tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance untuk Penghindaran Pajak. Proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, dan komite audit adalah variabel Jenis GCG penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory. Penelitian sampel yang digunakan 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Hasil regresi menjelaskan bahwa proporsi CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara komite audit dan kualitas auditor eksternal untuk nilai perusahaan.

Kata Kunci : Perusahaan, Institusional, Auditor

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu unsur yang cukup penting bagi suatu negara guna mendanai segala bentuk pengeluaran negara. Pajak pada

perusahaan, dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih entitas tersebut. Secara umum suatu entitas meminimalkan

beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak ini memaksa perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak atau yang sering disebut dengan *tax avoidance* (Suandy, 2014). Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalisasikan pajak namun tetap sesuai dalam kaidah perpajakan. Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun disamping itu menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica dan Toly, 2014).

Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi eko-nomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat luas atau untuk pembangunan (World Bank Group dalam Sutedi, 2015). Perusahaan yang menerapkan kegiatan CSR melakukan usaha untuk memperoleh profit yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas tersebut.

Beberapa item CSR menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya biaya pengolahan limbah, biaya magang, beasiswa, dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan dan lain-lain (Femitasari, 2014). Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk agar penghasilan yang dikenakan pajak menjadi berkurang dengan cara melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto.

Sebuah entitas yang melakukan kegiatan CSR dengan baik, tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik dalam mengelola perusahaannya. Kegiatan *corporate governance* yang disebut juga dengan CG adalah suatu tata kelola perusahaan. Suatu entitas memiliki tata kelola untuk mengontrol dan menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). CG merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stockholders*. Tata kelola perusahaan mulai menjadi bahan pembicaraan di Indonesia pada tahun 1998 ketika negeri ini mencapai krisis. Banyak pihak beropini lamanya perbaikan dalam bidang ekonomi pada saat itu disebabkan oleh lemahnya penerapan CG pada suatu entitas atau perusahaan. Akhirnya pemerintah maupun investor benar-benar memberikan perhatian khusus pada CG. Penerapan CG diharapkan bisa mempengaruhi entitas untuk berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi manajerial perusahaan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Irawan dan Aria, 2012).

Struktur CG juga mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* tentu perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar sehingga hal tersebut menjadikan citra buruk bagi perusahaan. Hal tersebut juga mencerminkan lemahnya penerapan CG pada perusahaan. Penelitian Fadhila, (2014) serta penelitian Pramudito dan Sari, (2015) menggunakan struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel CG. Melalui struktur kepemilikan, pengawasan kinerja manajemen dan pengawasan kepada manajerial akan lebih optimal sehingga mengurangi konflik manajemen. Investor institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang juga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Fadhila, 2014).

Dewan Komisaris juga merupakan elemen penting dalam CG yaitu bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007 dalam Fadhila, 2014). Dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005 dalam Fadhila, 2014). Komite Audit juga berperan dalam CG, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan baik, melaksanakan pengawasan dengan baik terkait penyajian laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari tindakan *tax avoidance* (Fadhila, 2014). Prinsip keterbukaan dan transparansi juga sangat disarankan pada perusahaan. Prinsip transparansi membuat informasi harus diungkap secara terbuka, tepat waktu, dan jelas menyangkut dengan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1) *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu upaya yang sungguh dari suatu entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam rana ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Rachmad, Nurdizal; Asep, Effendi; Emir, Wicaksana, 2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, bahkan lapisan masyarakat. Jika sebuah perusahaan mengelolah CSR perusahaannya dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan maupun manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan yaitu, dalam hal rekrutmen, motivasi dan refrensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun dan mem-pertahankan kerja

sama. Pengungkapan CSR dilakukan menggunakan pendekatan CSDI. Pendekatan ini menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al., 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut (Haniffa et al., 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007):

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

CSDI_j = *Corporate Social Disclosure Index* perusahaan j

N_j = jumlah item yang harus diungkapkan, n_j = 78

X_{ij} = jumlah item yang diketahui mendapat skor 1 jika item tidak diketahui, 0 jika item tidak diketahui pengungkapannya.

2) *Corporate Governance*

Corporate governance juga diartikan sebagai rangkaian kebijakan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang memiliki banyak tatanan. Salah satu aspek utama yang termasuk tata kelola suatu entitas atau perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas, tanggung jawab, khususnya penerapan yang berasal dari pedoman dan mekanisme untuk memberi kepastian perilaku yang baik dan memberi perlindungan bagi kepentingan pemegang saham. Corporate Governance mulai mendapat perhatian khusus di Indonesia setelah Indonesia dilanda krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Banyak pihak berpendapat bahwa krisis tersebut diakibatkan karena lemahnya corporate governance yang diterapkan pada perusahaan di Indonesia. Untuk itu pemerintahan Indonesia mulai memberikan

perhatian dalam praktek corporate governance (Annisa dan Kurniasih, 2012). Corporate Governance berkaitan dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap terhadap iklim usaha di suatu negara. Pada tahun 1999 telah dibentuk komite untuk memberikan pedoman bagi keberlangsungan corporate governance pada perusahaan yang dinamakan Good Corporate Governance (GCG). Pedoman ini merupakan salah satu pilar dalam sistem perekonomian. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Pengukuran corporate governance dalam penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial, kepemilikan yang dimiliki institusional, prosentase dewan komisaris independen, komite yang berkepentingan dalam audit dan kualitas auditor yang digunakan sebagai variabel dari *corporate governance* mengacu pada penelitian Fadhila, (2014) serta Pramudito dan Sari, (2015) yang telah dipaparkan sebagai berikut :

a) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial diduga dapat menyamakan antara kepentingan pemegang saham oleh manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila mengalami kerugian yang ada sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiati dalam Bachtiar, 2015).

b) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing, maupun masyarakat umum yang memiliki saham lebih dari 5% (Widarjo, 2010). Kepemilikan institusional terdapat 2 jenis yaitu kepemilikan minoritas dan mayoritas. Kepemilikan saham oleh institusional mayoritas adalah institusi yang memiliki saham lebih dari 5% sedangkan minoritas kurang dari 5% (Pujiati, 2009).

c) Dewan Komisaris

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

d) Komite Audit

Pembentukan komite audit bertujuan sebagai membantu komisaris audit menjadi pihak pengawas sebagai efektifitas pengendalian intern dan efektifitas tugas auditor luar dan dalam entitas tersebut. Komite audit setidaknya memiliki akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi terkait entitas. Komite audit berfungsi untuk membantu pihak manajerial dalam intermediaries atau penghubung antara pihak manajerial perusahaan dengan auditor eksternal perusahaan (Toha, 2008 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

e) Kualitas Audit

Transparansi terhadap pemegang saham dapat tercapai apabila perusahaan melaporkan hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pada rapat dengan pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam perpajakan semakin dituntut oleh publik. Sering kali publik beranggapan terhadap perilaku pajak yang agresif. Kualitas Audit dilihat dengan kualitas auditornya yang diukur lewat jenis KAP yang digunakan perusahaan dalam memeriksa laporan perusahaan. KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada (Winata, 2014).

3) Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang

ada. Artinya tax avoidance melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Bactiar, 2015). Tax avoidance merupakan suatu usaha perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil laba perusahaan.

4) Hipotesis

Hipotesis Pertama

H1 : Variabel pengungkapan CSR (X1), *Manajerial Ownership* (X2), *Institusional Ownership* (X3), Dewan Komisaris Independen (X4), Komite Audit (X5), Kualitas Audit (X6) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Tax Avoidance.

Hipotesis Kedua

H2 : Variabel pengungkapan CSR (X1), *Manajerial Ownership* (X2), *Institusional Ownership* (X3), Dewan Komisaris Independen (X4), Komite Audit (X5), Kualitas Audit (X6) berpengaruh secara parsial terhadap Tax Avoidance.

Hipotesis Ketiga

Berdasarkan penelitian Widyasari, 2015 variabel yang paling dominan adalah dewan komisaris.

H3 : Variabel Dewan Komisaris (X4) berpengaruh secara dominan terhadap Tax Avoidance.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pengujian hipotesis (*explanatory research*). Metode pengumpulan data yang digunakan digunakan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan dari website BEI. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014, b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode pengamatan, c. Perusahaan yang mengeluarkan laporan

keuangan dalam mata uang rupiah, d. Perusahaan yang tidak memiliki akumulasi rugi fiskal, e. Perusahaan yang listing sebelum periode yang diteliti dan tidak delisting selama periode yang diteliti, f. Perusahaan yang memiliki saham kepemilikan manajerial.

1) Corporate Social Responsibility

Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut :

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

CSDI_j = Corporate Social Disclosure Index perusahaan j

N_j = jumlah item yang harus diungkapkan, n_j = 78

X_{ij} = jumlah item yang diungkapkan : 1 =

2) Kepemilikan manajerial

Perhitungan kepemilikan manajerial menggunakan, jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100%.

3) Kepemilikan Institusional

Perhitungan kepemilikan institusional diukur dengan mem-bandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar dikalikan 100%.

4) Dewan Komisaris

Perhitungan dewan komisaris diukur dengan menggunakan jumlah komisaris independen pada perusahaan dibandingkan dengan total komisaris yang ada pada perusahaan.

5) Komite Audit

Perhitungan komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit perusahaan.

6) Kualitas Audit

Kualitas audit biasa diukur melalui kinerja auditor yang tergolong dalam KAP *Big Four*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* maka mendapat nilai satu dan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP non *Big Four* mendapat skor nol (Perdana, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas antar variabel independen). Berdasarkan pengembangan hipotesis yang diuraikan, maka dapat ditetapkan model

regresi linier berganda sebagai berikut (Winata, 2014) dan (Annisa dan Kurniasih, 2012):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Penjelasan :

Y = TAX.AVO

a = Konstanta

b₁, b₆ = Koefisien regresi X₁..X₆

X₁ = CSR

X₂ = KEP.MANAJ

X₃ = KEP.INST

X₄ = DEW.KOM

X₅ = KOM.AUD

X₆ = KUA.AUD

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

1) Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) merupakan mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dapat menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan yaitu nilai yang telah disesuaikan atau yang disebut *adjusted R²*. *Adjusted R²* yang mendekati satu menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang semakin kuat.

Tabel 1. Model Summary Koefisien Determinasi

Model	R (Korelasi)	R Square (Determinasi)	Adjusted R Square
1	0.743	0.552	0.502

Sumber: Data Diolah, 2016

Adjusted R² dihitung dengan cara mengalikan *adjusted R²* dengan 100% (*adjusted R²* × 100%). Berdasarkan tabel 1, *adjusted R²* sebesar 0,502 atau 50,2 %. Nilai *adjusted R²* tersebut menunjukkan prosentase sumbangan pengaruh variabel proporsi CSR, KEP.MANAJ, KEP.INST, DEW.KOM, KOM.AUD, KUA.AUD terhadap TAX.AVO yaitu sebesar 50,2%, sedangkan sisanya sebesar 49,8% (100% - 50,2% = 49,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2) Uji t (Parsial)

Variabel pengungkapan CSR melalui CSDi berpengaruh signifikan dengan positif terhadap TAX.AVO (*tax avoidance*). Terbukti berdasarkan hasil uji parsial atau uji t pada yang diperoleh dari hasil regresi dengan

signifikansi variabel pengungkapan CSR senilai 0,011 dengan t hitung senilai 2,634. Ini menunjukkan signifikansi variabel CSR 0,011 < 0,05 (taraf signifikansi), maka H2 diterima yang berarti variabel CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial. Hasil regresi ini juga mendukung hasil regresi dari Femitasari, (2014) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh secara signifikan positif terhadap *tax aggressive* atau agresivitas pajak. Ini dikarenakan CSR belum termasuk dalam urutan pengurang pajak oleh karena itu perusahaan atau sebuah entitas berusaha melakukan kegiatan tersebut agar terjadi selisih antar laba pada laporan keuangan.

Variabel kepemilikan manajerial (KEP.MANAJ) berpengaruh signifikan secara negatif terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO) Hasil ini berdasarkan hasil uji parsial atau uji t pada regresi diperoleh signifikansi variabel KEP.MANAJ senilai 0,014 dengan t hitung senilai -2,538. Pengujian regresi menunjukkan signifikansi variabel kepemilikan manajerial 0,014 < 0,05 (taraf signifikansi) yang berarti bahwa H2 diterima artinya variabel kepemilikan manajerial (KEP.MANAJ) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Ini dikarenakan saham yang dimiliki oleh manajer cenderung membuat para manajer mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan yang dikelolanya sehingga para manajer tidak ingin usahanya memiliki masalah terkait pajak atau upaya penghindaran pajak. (Pramudito dan Sari, 2015).

Tabel 2. Pengujian Parsial (t-test).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		T	sig
	Beta	Std. Error	Beta			
Constant	-27,396	11,093			-2,470	,017
CSR	2,825	1,073	,258		2,634	,011
KEP.MANAJ	-,557	,219	-,380		-2,538	,014
KEP.INST	-7,503	3,187	-,331		-2,354	,022
DEW.KOM	11,739	2,480	,554		4,733	,000
KOM.AUD	3,444	2,523	,147		1,365	,178
KUA.AUD	-,236	,628	-,039		-,375	,709

Sumber : Data Diolah, 2016

Keterangan :

CSR = Corporate Sosial Responsibility
KEP.MANAJ = Kepemilikan Manajerial
KEP.INST = Kepemilikan Institusional
DEW.KOM = Dewan Komisaris
KOM.AUD = Komite Audit
KUA.AUD = Kualitas Audit

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Hasil regresi uji parsial atau uji pada diperoleh signifikansi variabel kepemilikan institusional (KEP.INST) senilai 0,022 dengan t hitung senilai -2,354. Pengujian ini menunjukkan taraf signifikansi variabel kepemilikan institusional (KEP.INST) $0,022 < 0,05$ (taraf signifikansi), yang berarti bahwa H2 diterima artinya secara parsial variabel kepemilikan institusional (KEP.INST) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Serupa dengan hasil penelitian Khurana dan Moser, 2009 yang menyatakan Kepemilikan Institusional (KEP.INST) secara negatif berpengaruh signifikan parsial terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Ini dikarenakan semakin tingginya kepemilikan institusional akan semakin mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja para manajemen dengan memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan (Khurana dan Moser, 2009).

Proporsi dewan komisaris independen (DEW.KOM) memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Hasil ini berdasarkan hasil uji parsial atau uji t pada regresi diperoleh signifikansi variabel proporsi komisaris independen (DEW.KOM) senilai 0,000 dengan t hitung senilai 4,733. Ini menunjukkan signifikansi variabel proporsi komisaris independen (DEW.KOM) $0,000 < 0,05$ (taraf signifikansi), yang berarti dapat disimpulkan bahwa H2 diterima artinya secara parsial variabel proporsi komisaris independen (DEW.KOM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Penelitian ini sesuai dengan hasil regresi yang dilakukan oleh Winata, (2014) yang menyatakan bahwa secara dewan komisaris (DEW.KOM) berpengaruh positif secara signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Penelitian ini

menjelaskan apabila dewan komisaris meningkat maka tindakan *tax avoidance* juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh independensi komisaris perusahaan yang memperlihatkan bahwa sebesar apapun komisaris independen perusahaan, komisaris independen perusahaan tetap memiliki jumlah lebih sedikit dari pihak yang terafiliasi pada perusahaan. Selain itu tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik (Winata, 2014).

Komite audit (KOM.AUD) memiliki pengaruh tidak signifikan secara positif terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Ini merupakan hasil uji parsial atau uji t pada regresi yang diperoleh signifikansi variabel komite audit (KOM.AUD) senilai 0,178 dengan t hitung sebesar senilai 1,365. Hasil regresi ini menunjukkan nilai signifikansi variabel komite audit $0,178 > 0,05$ (taraf signifikansi), yang berarti disimpulkan H2 ditolak artinya secara parsial variabel komite audit (KOM.AUD) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Ini disebabkan oleh jumlah komite audit yang berada di dalam sebuah entitas atau perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* atau tidak dan jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan bisa melakukan intervensi dan berperan dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015). Selain itu komite audit berfungsi hanya untuk membantu para dewan komisaris dalam intermediaries atau penghubung antara para dewan komisaris dengan auditor eksternal sebuah perusahaan (Toha, 2008). Jadi komite audit tidak terlibat secara langsung dalam hal audit. Hasil regresi ini mendukung penelitian yang dilakukan Damayanti dan Susanto, 2015 yang menyatakan bahwa secara parsial Komite Audit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian ini tidak mendukung Anissa dan Kurniasih, 2012 yang mengatakan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kualitas auditor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*

(TAX.AVO). Berdasarkan hasil uji parsial atau uji t pada regresi diperoleh signifikansi variabel kualitas auditor eksternal senilai 0,709 dengan t hitung senilai -0,375. Ini menunjukkan nilai signifikansi variabel kualitas auditor eksternal $0,709 > 0,05$ (taraf signifikansi), yang berarti disimpulkan bahwa H2 ditolak artinya secara parsial variabel kualitas auditor (KUA.AUD) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (TAX.AVO). Hasil uji regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa kualitas audit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini dikarenakan ketika KAP melakukan audit pada suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah dipatenkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada (Winata, 2014). Hasil uji regresi ini mendukung penelitian yang dilakukan Winata, (2014) yang menjelaskan bahwa secara parsial kualitas audit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian ini tidak mendukung Anissa dan Kurniasih, 2012 yang mengatakan bahwa Kualitas Audit secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap *tax avoidance* karena menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang secara signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap penanggulangan praktek atau tindakan *tax avoidance*.

3. Variabel Dominan

Berdasarkan perhitungan statistik dapat diketahui bahwa yang paling dominan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* adalah dewan komisaris karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar. Hal ini berarti H3 diterima bahwa Dewan Komisaris secara dominan mempengaruhi *tax avoidance* dibandingkan dengan CSR, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini mendukung penelitian

Widyasari, (2015) menjelaskan bahwa dewan komisaris (DEW.KOM) berpengaruh secara dominan terhadap *tax avoidance* (TAX.AVO). Hal ini disebabkan oleh independensi komisaris perusahaan yang memperlihatkan bahwa sebesar apapun komisaris independen perusahaan, komisaris independen perusahaan tetap memiliki jumlah lebih sedikit dari pihak yang terafiliasi pada perusahaan. Selain itu tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik (Winata, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Dewan komisaris memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Kualitas audit memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

2) Saran

- Sebaiknya pemerintah maupun DJP agar bisa memasukkan CSR sebagai urutan dalam pengurang pajak karena agar tidak salah dalam memaknai CSR pada perusahaan.
- Untuk perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan lagi kinerja dewan komisaris khususnya dewan komisaris independen untuk lebih meningkatkan independensinya agar tindakan *tax avoidance* pada setiap perusahaan dapat dihindarkan diantaranya dengan menambah jumlah dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan memiliki pengetahuan

lebih tentang perpajakan perusahaan serta memiliki tingkat independensi yang tinggi. Mengingat peran dewan komisaris dalam penelitian ini paling dominan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

- c) Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian kembali terutama mengenai CSR dan *corporate governance*, sebaiknya ditambahkan lagi periode tahun penelitiannya agar terlihat perbedaan dari tahun ke tahun dan sebaiknya menggunakan perusahaan dari sektor lain sebagai pembandingan penelitian. Selain itu diharapkan peneliti lainnya mengganti variabel penelitian yang akan datang dengan variabel lainnya diluar variabel dalam penelitian ini dan memberikan pemaknaan yang lebih spesifik pada CSR dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa dan Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". Jurnal Akuntansi dan Auditing, (Online), Vol. 8 No. 2.
- Bachtiar, Mochamad Danu. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate* (Etr). Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Damayanti dan Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen, (Online), Vol. 5, No. 2.
- Fadhila, Rahmi. 2014. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". Jurnal Universitas Negeri Padang
- Femitasari, Lina. 2014. Pengaruh Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. Surabaya. Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan." Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Jessica dan Arianto Toly. 2014. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak". Jurnal Tax dan Accounting Review, (Online), Vol. 4, No.1.
- Khurana dan Moser. 2009. Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness. University of Missouri Columbia, MO 65211.
- Pramudito dan Sari. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*. Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3
- Rachmad, Nurdizal; Asep, Effendi; Emir, Wicaksana. 2011. Panduan Lengkap Perencanaan CSR. Jakarta:Penebar Swadaya
- Sayekti dan Wondabio. (2007). Pengaruh Response Coefficient (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di bursa efek Jakarta). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Makassar.
- Suandy, Erly. 2014. Perencanaan Pajak Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2015. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Winata, 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Jurnal *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1, 2014, (Online). Vol. 25 No. 2.